

DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Dynamics of Community Participation In Village Infrastructure Development Toraja District

Desvani Ayu Elvandari^{1*}, Sakaria Anwar², Muhammad Adnan Kasogi³

¹Program Sarjana Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu
Politik, Universitas
Hasanuddin, Indonesia.

*Email:

vaniayu0412@gmail.com

^{2,3}Departemen Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial & Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia.

Keywords: *Community Participation; Community Self-Reliance; Infrastructure; Village Development; Tana Toraja*

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat; Swadaya Masyarakat; Infrastruktur; Pembangunan Desa; Tana Toraja*

DOI:

<https://10.61731/dpmr.v5i1.44191>

Copyright: © 2025 Desvani Ayu Elvandari, Sakaria Anwar, Muhammad Adnan Kasogi
This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Abstract

This study aims to identify the forms of community participation and the factors that encourage community involvement in road construction in Batualu Village, South Sangalla District, Tana Toraja Regency. Forms of community participation include contributions of labor, property or objects, thoughts/ideas, and skills. The factors that encourage participation include individual awareness, willingness, opportunities, and abilities possessed by the community. This study uses a descriptive quantitative approach with primary data collection through questionnaires and limited interviews, as well as secondary data from related agencies. The results of the study indicate that participation in the form of labor is the most dominant contribution. This finding emphasizes the importance of community empowerment in village infrastructure development based on local initiatives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan jalan di Desa Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Bentuk partisipasi masyarakat mencakup kontribusi tenaga, harta atau benda, pemikiran/ide, serta keterampilan yang dimiliki. Adapun faktor pendorong partisipasi meliputi kesadaran individu, kemauan, kesempatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara terbatas, serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan kontribusi yang paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis inisiatif lokal.

PENDAHULUAN

Pembangunan ialah proses yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur misalnya jalan yang memadai maka akses transportasi, jalur perekonomian, dan akses untuk ke wisata dan kampung halaman di Toraja menjadi lebih mudah. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan agar pembangunan desa berhasil dan dapat dilaksanakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri, melalui proyek pembangunan desa yang melibatkan masyarakat (Riswanto, 2022).

Pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan merupakan salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Jalan desa sebagai bagian dari infrastruktur dasar memegang peran krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan (Bappenas, 2020). Namun, hingga kini masih banyak desa di Indonesia yang mengalami kesenjangan infrastruktur jalan, termasuk di daerah-daerah potensial seperti Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai kawasan dengan daya tarik wisata dan budaya tinggi (Itamar et al., 2014). Desa Batualu, yang merupakan salah satu pintu penghubung antar kabupaten di kawasan ini, menghadapi kondisi jalan yang rusak selama puluhan tahun tanpa penanganan dari pemerintah. Ketimpangan ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan desa, peran serta masyarakat menjadi elemen vital yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi merupakan kekuatan penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah lama dikembangkan dalam pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (World Bank, 1996). Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa tenaga, dana, pemikiran, maupun keterampilan. Sayangnya, meskipun konsep ini telah banyak diakui, implementasinya di berbagai wilayah masih timpang. Banyak studi sebelumnya lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan atau perumusan kebijakan, namun belum banyak yang mendokumentasikan secara mendalam kontribusi masyarakat secara swadaya dalam pembangunan fisik, khususnya jalan desa, di wilayah terpencil. Pembangunan desa mendapatkan tempat yang sangat strategis karena desa menjadi basis dan landasan pembangunan Nasional dengan karakteristik agraris yang masih tetap dominan. Masyarakat desa ingin dilihat dan dihadirkan tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek yang menjadi pelaksana dan pemeran aktif pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakat itu sendiri adalah objek dan subjek pembangunan karenanya harus diperhitungkan. Lagi pula hasil pembangunan dirancang, diselenggarakan, dibiayai oleh

pemerintah diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah senantiasa mengharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Peran serta itu mulai dari tahap memikirkan, merencanakan, melaksanakan, memelihara sampai kepada tahap mengembangkan pembangunan. (Sakaria, 1993)

Tana Toraja merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang berpotensi untuk dikembangkan karena mempunyai banyak objek pariwisata. Hasil dari pariwisata itu adalah salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah semakin banyaknya daerah tujuan wisata yang dibuat dan dibuka oleh pemerintah (Itamar, 2014), namun dukungan infrastruktur khususnya aksesibilitas jalan dan jembatan saat ini masih kurang memadai. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dapat dicapai dengan keterpaduan dan kesinergian antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan daerah dan kepariwisataan nasional perlu ditingkatkan agar potensi kebudayaan dan kepariwisataan nasional menjadi kekuatan ekonomi dan budaya guna meningkatkan daya saing global (Andi Patiroid, 2022).

Kondisi jalan yang buruk juga akan menghambat lalu lintas perekonomian suatu daerah yang mana berakibat pada kelancaran akses perekonomian suatu masyarakat, yang mengakibatkan mobilitas antara daerah dan distribusi barang menjadi sulit. Proses partisipasi adalah cara paling efektif untuk merubah pola berpikir tidak hanya pada masyarakat kecil tetapi menjangkau seluruh masyarakat. Salah satu daerah yang belum mendapatkan bantuan perbaikan jalan yaitu di desa Batualu, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Padahal, jalan tersebut merupakan akses warga dari tiga desa yaitu, Lembang Batualu, Batualu Selatan, dan Pa'tengko dan jalan tersebut juga merupakan jalan alternatif menuju Bandara Toraja (*Toraja Airport*) dan juga merupakan jalan lintas kabupaten karena menghubungkan antara Toraja Utara, Tana Toraja dan Enrekang jadi jalan ini juga termasuk lintas perekonomian masyarakat, dan sudah 26 tahun jalan di desa tersebut rusak dan tak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah (Ricdwan Abbas, 2022).

Dengan kondisi jalan yang rusak parah maka masyarakat lokal dan masyarakat perantau, secara sukarela memperbaiki jalan Batualu, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat bergoyong royong memperbaiki jalan yang rusak dan sumber anggaran murni dari masyarakat perantau dan masyarakat lokal dan tidak ada sumbangan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Meskipun demikian masyarakat Batualu pun sangat berharap pemerintah bisa memperjuangkan perbaikan jalan Batualu agar desa Batualu bisa lebih berkembang kedepannya (Ricdwan Abbas, 2022).

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memberikan fokus pada pengalaman empiris masyarakat Desa Batualu dalam membangun dan memperbaiki jalan secara swadaya, tanpa dukungan langsung dari pemerintah maupun lembaga donor. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana solidaritas sosial, kepedulian kolektif, dan kesadaran warga dapat menjadi motor penggerak pembangunan di tengah keterbatasan fiskal

negara. Studi ini menambah literatur penting tentang bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat dan efektivitas model pembangunan berbasis lokal (Chambers, 1997; Uphoff, 2005). Di sisi lain, konteks ini juga memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi distribusi keadilan sosial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah pinggiran. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan sosial.

Berangkat dari konteks tersebut, penting untuk menggali secara sistematis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di wilayah pedesaan dapat terwujud, terutama dalam situasi di mana intervensi negara minim atau bahkan absen. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Apa saja bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Batualu? dan (2) Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk memahami secara lebih mendalam dinamika sosial, motivasi, serta potensi kolektif masyarakat lokal dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara swadaya. Jawaban terhadap pertanyaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pembangunan desa yang lebih inklusif dan berbasis kemandirian masyarakat.

Kajian Literatur

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan elemen fundamental dalam pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Konsep ini menjadi kerangka kerja utama dalam pembangunan desa karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek dari pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, konsep partisipasi semakin diperkuat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dan otonomi desa dalam menyusun serta mengelola pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat bukan hanya pelengkap dalam struktur pemerintahan desa, melainkan komponen aktif dalam menentukan arah dan strategi Pembangunan.

Beberapa teori penting digunakan dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di antaranya teori partisipasi dari Arnstein (1969) yang memperkenalkan "Tangga Partisipasi" (*Ladder of Citizen Participation*). Teori ini menggambarkan delapan tingkatan partisipasi, mulai dari manipulasi (tingkat terendah) hingga kontrol warga (tingkat tertinggi). Dalam konteks desa, partisipasi sering kali berada di level simbolik,

seperti konsultasi atau informasi, namun belum menyentuh tingkat partisipasi aktif atau pemberdayaan.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan menurut Friedmann (1992) dan Chambers (1997) menekankan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan, kekuasaan, dan sumber daya. Teori ini menunjukkan bahwa partisipasi sejati adalah ketika masyarakat memiliki *voice* (suara) dan *choice* (pilihan) dalam proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, sangat tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Studi oleh Latif et al. (2019) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh rasa kepemilikan terhadap proyek dan transparansi penggunaan dana. Ketika warga merasa proyek tersebut akan berdampak langsung pada kehidupan mereka, partisipasi mereka meningkat signifikan, terutama dalam bentuk gotong royong dan kontribusi tenaga.

Fenomena ini juga ditemukan di Desa Warung Bambu (Pramudya et al., 2022), di mana masyarakat menjadi motor utama dalam pembangunan jalan dan fasilitas desa. Peran tokoh lokal dan sistem kelembagaan adat juga turut berpengaruh dalam mobilisasi partisipasi masyarakat secara sukarela.

Berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mustanir (2016) menyebutkan bahwa faktor seperti tingkat pendidikan, kepemimpinan desa, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta akses terhadap informasi pembangunan sangat menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Faktor motivasional lainnya meliputi nilai solidaritas sosial, pengalaman kolektif dalam menghadapi masalah pembangunan, serta budaya gotong royong yang masih kuat di banyak desa Indonesia.

Dalam hal ini, teori motivasi partisipatif dari Oakley dan Marsden (1984) juga relevan. Mereka menjelaskan bahwa partisipasi akan tumbuh jika masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai, hasilnya nyata, dan ada rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang mengedepankan transparansi dan inklusivitas memiliki peluang lebih besar untuk melibatkan masyarakat secara aktif.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan ruang partisipatif bagi masyarakat. Studi Wicaksono (2015) di Desa Sumberpasir menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola forum musyawarah desa dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif seperti akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi. Keberadaan lembaga adat, kelompok tani, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi instrumen penting dalam memperluas partisipasi warga.

Namun, tidak semua kelembagaan desa berfungsi secara optimal. Beberapa penelitian menyoroti adanya dominasi elite lokal atau ketidakseimbangan informasi

yang menghambat proses partisipatif. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk membangun kapasitas institusional yang kuat guna menjamin proses pembangunan yang benar-benar inklusif (Hadi, 2010).

Dalam kajian empiris oleh Laksana (2013) mengenai program Desa Siaga di Gunung Kidul, ditemukan bahwa bentuk partisipasi yang paling dominan adalah kontribusi tenaga dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, partisipasi dalam pengambilan keputusan masih lemah karena masyarakat merasa tidak memiliki kapasitas atau informasi yang cukup untuk berargumen secara formal.

Penelitian lain oleh Ernawati dan Saptomo (2017) di Kecamatan Kelayang juga mencatat bahwa partisipasi meningkat signifikan ketika program pembangunan menggunakan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan. Masyarakat yang dilibatkan sejak awal merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Meskipun partisipasi sering diagungkan dalam wacana pembangunan, beberapa peneliti mengkritisi bahwa tidak semua bentuk partisipasi bersifat substantif. Fungsi partisipasi kerap direduksi menjadi formalitas administratif, seperti menghadiri musyawarah tanpa memiliki pengaruh nyata dalam keputusan (Masjhoer, 2025). Hal ini mengarah pada praktik “partisipasi semu” yang hanya memenuhi aspek legal, tetapi tidak menyentuh aspek transformasional.

Lebih jauh, pendekatan *top-down* dari pemerintah juga menjadi hambatan struktural. Ketika agenda pembangunan sudah ditentukan dari atas tanpa ruang dialog, partisipasi masyarakat hanya menjadi alat legitimasi, bukan proses demokratis yang sejati. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara partisipasi prosedural dan partisipasi substantif dalam analisis ilmiah.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan gejala atau fenomena sosial secara kuantitatif dengan cara menghimpun data yang berbentuk kata-kata atau kalimat yang nantinya akan diolah secara kuantitatif dengan mengkonversi data secara numerik menjadi frekuensi atau tingkat. Pendekatan kuantitatif akan memisahkan dunia sosial ke unsur-unsur empiris yang disebut variabel dengan tujuan untuk mencari keteraturan pada kehidupan manusia. (Martono, 2016).

Penelitian menggunakan penelitian survei yang bertujuan untuk mengetahui kondisi objek studi melalui kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan terkait dengan variabel yang diteliti secara mendalam (Nurlan, 2019).

Maka sampel yang di ambil dari populasi harus representatif (mewakili). Adapun dalam penelitian ini, kriteria-kriteria yang di tetapkan sebagai responden, berikut

kriterianya :1. Masyarakat di Desa Batualu; 2. Panitia kegiatan pembangunan jalan Batualu; 3. Masyarakat Perantau Batualu. Total responden yang telah diwawancarai sebesar 81 responden dari jumlah populasi 446 populasi didapatkan dari perhitungan rumus slovin sample.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prinsip probability sampling. Dalam prinsip probability sampling ada beberapa teknik sampling yang bisa digunakan, peneliti dalam hal ini menggunakan Teknik pengambilan sampel undian (*Lottrey sampling*). Adapun sampel undian yang dimaksud dalam penelitian adalah melakukan undian terhadap sampel dalam hal ini memperhatikan urutan nama yang ada di data Kartu Keluarga dari kantor lembang, untuk selanjutnya diundi dan akan menjadi dasar untuk menentukan sampel dengan menggunakan aplikasi Random Number Generator untuk menentukan responden. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari perhitungan sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror level (kesalahan) sebesar 10% atau 0.1. berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel adalah 81 responden.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data ialah; kuesioner; wawancara terbatas; observasi. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk membeikan gambaran secara spesifik mengenai suatu objek yang nantinya akan digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik selama peroses penelitian berjalan (Sakaria, et.al,2022).

Dalam analisis data kuantitatif, sebelum kita menganalisis, kita perlu mempelajari karakteristik dari data tersebut seperti bagaimana bentuk atau pola dari sebaran data dan apakah ada pencilan dari data tersebut. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Teknik yang digunakan dalam penyajian data dalam penelitian ini adalah tabel distribusi frekuensi, diagram batang, dan diagram lingkaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang berlokasi di desa Batualu, kecamatan Sangalla Selatan, kabupaten Tana Toraja. Data didapatkan dengan wawancara sebagai data primer dan data yang diperoleh di kantor desa Batualu sebagai data sekunder.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Batualu dalam Pembangunan Jalan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Batualu dalam pembangunan jalan tercermin dalam empat bentuk utama: tenaga, pemikiran/ide, harta atau benda, dan keterampilan. Berdasarkan data kuesioner yang dianalisis dari 81 responden, partisipasi berbasis tenaga menempati porsi paling dominan, yaitu sebesar

74%. Hal ini mencerminkan kuatnya budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang masih terpelihara di lingkungan masyarakat pedesaan. Kontribusi tenaga meliputi aktivitas langsung dalam perbaikan jalan seperti mengangkut material, meratakan tanah, dan membantu teknis pengerjaan secara sukarela.

Bentuk partisipasi berikutnya adalah pemikiran atau ide, yang diakui oleh 11% responden. Partisipasi ini diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam forum musyawarah desa, penyampaian gagasan teknis sederhana, serta saran terkait strategi pembangunan dan alokasi sumber daya lokal. Meski secara persentase lebih kecil dibandingkan tenaga, kontribusi pemikiran menandai adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, walaupun terbatas oleh tingkat pendidikan atau keberanian berpendapat.

Partisipasi dalam bentuk harta atau benda diakui oleh 7% responden. Bantuan yang diberikan umumnya berupa sumbangan dana tunai, material konstruksi (semen, pasir, kayu), atau makanan untuk pekerja lapangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan finansial masyarakat terbatas, beberapa warga tetap menunjukkan kepedulian melalui kontribusi materiil.

Sementara itu, hanya 3% responden yang menyatakan keterlibatan melalui keterampilan atau keahlian teknis, seperti pengukuran jalan atau penyusunan rencana pembangunan sederhana. Rendahnya angka ini mengindikasikan keterbatasan sumber daya manusia dengan keterampilan teknis di desa, serta lemahnya integrasi antara masyarakat ahli dan kebutuhan proyek lokal.



Sumber: Data Primer 2024

Sebanyak 5% responden tidak menjawab pertanyaan ini karena sebelumnya menyatakan tidak terlibat dalam pembangunan jalan. Hal ini menjadi penting untuk dicermati sebagai indikasi adanya kelompok yang terpinggirkan atau tidak terlibat,

sehingga menuntut perhatian lebih dalam upaya memperluas jangkauan partisipasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini memperkuat temuan teoritis Cohen dan Uphoff (1977) bahwa bentuk partisipasi masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi: partisipasi fisik, intelektual, finansial, dan keahlian. Dalam konteks Batualu, partisipasi fisik (tenaga) menjadi bentuk dominan karena paling mudah dijangkau oleh masyarakat yang sebagian besar memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Hasil ini juga sejalan dengan pandangan Oakley & Marsden (1984) bahwa partisipasi akan lebih tinggi ketika program pembangunan bersifat langsung dan memiliki manfaat yang nyata bagi keseharian warga.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Batualu dalam Pembangunan Jalan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dianalisis terhadap 81 responden, terdapat tiga faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat Desa Batualu dalam pembangunan jalan desa: kemauan individu, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor ini membentuk fondasi motivasional yang memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis swadaya.

Faktor pertama adalah kemauan individu, yang diakui oleh seluruh responden (100%) sebagai alasan utama mereka berpartisipasi. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi di antara warga. Mereka secara sukarela turut serta dalam kegiatan pembangunan tanpa paksaan dari pihak luar. Hal ini selaras dengan teori partisipasi aktif menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang menyatakan bahwa kemauan muncul dari persepsi masyarakat terhadap urgensi serta manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Dalam konteks Desa Batualu, rusaknya jalan selama lebih dari dua dekade menciptakan tekanan kebutuhan yang mendorong kesadaran kolektif warga untuk bertindak.

Faktor kedua adalah kesempatan untuk terlibat, juga diakui oleh seluruh responden. Masyarakat menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam kegiatan pembangunan melalui ajakan terbuka dari sesama warga, bukan dari struktur formal pemerintah. Artinya, kesempatan muncul dari inisiatif masyarakat sendiri, bukan dari perencanaan terstruktur oleh pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun desa memiliki struktur formal, peran informal dalam memobilisasi partisipasi sosial justru lebih dominan. Ini memperkuat argumen Uphoff (2005) bahwa *enabling environment* (lingkungan yang memfasilitasi) sangat menentukan tinggi rendahnya partisipasi, dan dalam kasus ini, inisiatif warga menggantikan fungsi negara yang absen.

Faktor ketiga adalah kemampuan masyarakat untuk berkontribusi. Semua responden menyatakan bahwa mereka merasa mampu berpartisipasi sesuai kapasitas masing-masing. Kemampuan tersebut bervariasi, mulai dari tenaga fisik, sumbangan ide, hingga sumbangan dana atau makanan bagi relawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi tumbuh ketika masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi

berdasarkan potensi dan keterbatasan masing-masing. Teori pemberdayaan oleh Friedmann (1992) menyebutkan bahwa masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi jika mereka memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan dirinya dan merasa bahwa kontribusi mereka dihargai.

Menariknya, hasil penelitian ini juga mencerminkan konsep solidaritas sosial dari Emile Durkheim, di mana masyarakat dengan relasi sosial yang erat cenderung menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam kerja kolektif. Nilai kekeluargaan dan budaya gotong royong yang masih kuat di Desa Batualu menjadi perekat utama dalam proses mobilisasi partisipasi warga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi warga bukanlah hasil intervensi dari atas (top-down), melainkan tumbuh dari kesadaran dan inisiatif lokal (bottom-up). Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman partisipasi sebagai fenomena sosial yang dapat tumbuh secara mandiri ketika masyarakat memiliki kebutuhan nyata, ruang aksi, dan rasa mampu untuk bertindak.

Diskusi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat Desa Batualu dalam pembangunan jalan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tenaga fisik (74%), sementara partisipasi dalam bentuk ide, harta benda, dan keterampilan cenderung lebih rendah. Temuan ini merefleksikan bentuk partisipasi yang bersifat spontan dan berbasis kebutuhan praktis, yang sejalan dengan model partisipasi fungsional sebagaimana dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977). Dalam model tersebut, partisipasi masyarakat terjadi ketika ada dorongan kebutuhan nyata dan peluang konkret untuk berkontribusi secara langsung terhadap proyek pembangunan.

Partisipasi dalam bentuk tenaga dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat literasi teknis dan ekonomi warga desa, yang membatasi ruang partisipasi mereka pada aspek-aspek yang tidak memerlukan modal tinggi atau keterampilan teknis. Hal ini diperkuat oleh temuan Laksana (2013) dan Marsingga & Pramudya (2022), yang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa Indonesia umumnya bersifat fisik dan informal. Meskipun demikian, partisipasi berbasis tenaga tidak dapat direduksi sebagai bentuk partisipasi rendah, sebab ia merupakan ekspresi kuat dari nilai sosial seperti gotong royong, kesetiaan komunal, dan moral kolektif terhadap pembangunan lokal.

Dari sisi motivasi, tiga faktor yang teridentifikasi dalam studi ini — kemauan, kesempatan, dan kemampuan — sangat relevan dengan kerangka teoritik partisipasi dari Oakley dan Marsden (1984). Menurut mereka, partisipasi akan muncul ketika ada kombinasi dari tiga unsur: kesadaran individu terhadap manfaat pembangunan, ruang sosial yang memungkinkan partisipasi, dan keyakinan akan kemampuan diri. Dalam kasus Desa Batualu, masyarakat tidak hanya menunjukkan kesadaran kolektif atas pentingnya perbaikan jalan, tetapi juga secara aktif menciptakan kesempatan dan menyesuaikan bentuk kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dengan kata lain,

mereka tidak hanya *diikutsertakan*, tetapi *menginisiasi* proses partisipatif — sebuah bentuk partisipasi transformatif (*transformative participation*) sebagaimana dijelaskan oleh Chambers (1997).

Lebih lanjut, temuan ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan yang berhasil tidak semata ditentukan oleh dukungan institusional dari pemerintah, tetapi juga oleh kohesi sosial dan keberdayaan komunitas. Ini menegaskan kembali pemikiran Friedmann (1992) tentang *empowerment* sebagai proses di mana masyarakat mengontrol sumber daya dan informasi yang mereka butuhkan untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Masyarakat Batualu, meskipun tidak mendapat dukungan negara, tetap mampu memobilisasi sumber daya lokal sebagai respons terhadap ketimpangan akses infrastruktur — sebuah tindakan yang memperlihatkan bahwa pembangunan dari bawah (*bottom-up development*) memiliki potensi riil untuk mengisi kekosongan negara dalam pembangunan desa.

Namun demikian, meskipun partisipasi tenaga mendominasi, rendahnya partisipasi dalam bentuk ide dan keterampilan menandakan adanya *partisipasi vertikal terbatas* — di mana masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam aspek pelaksanaan ketimbang dalam pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko melanggengkan *partisipasi semu* (*pseudo participation*), di mana warga hadir secara fisik tetapi tidak memiliki pengaruh dalam arah kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, untuk membangun kapasitas warga melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan agar mereka dapat berpartisipasi tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai perencana dan evaluator pembangunan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan di Desa Batualu bukan sekadar hasil kerja kolektif, tetapi juga representasi dari kekuatan komunitas yang terorganisir. Ini menggarisbawahi pentingnya memandang partisipasi masyarakat bukan sebagai instrumen teknis proyek pembangunan, tetapi sebagai pendekatan strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Batualu dalam pembangunan jalan desa merupakan manifestasi konkret dari inisiatif lokal yang tumbuh secara organik sebagai respons terhadap ketimpangan infrastruktur yang berkepanjangan. Partisipasi dominan melalui tenaga fisik mencerminkan bentuk keterlibatan yang paling mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal modal dan pendidikan formal. Di sisi lain, partisipasi dalam bentuk pemikiran, keterampilan, dan kontribusi materi masih rendah, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas dan peluang dalam peran pengambilan keputusan. Faktor-faktor pendorong utama seperti kemauan,

kesempatan, dan kemampuan terbukti saling memperkuat dalam membentuk solidaritas sosial yang menjadi landasan partisipasi kolektif.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus pada satu desa dengan konteks sosial-budaya yang khas membatasi generalisasi temuan ke wilayah lain. Kedua, pendekatan kuantitatif deskriptif tidak mampu menggali secara mendalam dinamika kualitatif seperti motivasi tersembunyi, resistensi, atau perbedaan kelas sosial dalam partisipasi. Selain itu, dimensi gender dan peran kelompok marginal dalam proses pembangunan tidak menjadi fokus eksplisit, padahal aspek tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap struktur partisipasi lokal.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan pengambil kebijakan pembangunan desa. Pertama, pembangunan infrastruktur hendaknya tidak hanya menunggu inisiatif dari negara, tetapi juga memperkuat dan memfasilitasi inisiatif masyarakat dengan memberikan akses terhadap dana, pelatihan teknis, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek, serta memastikan bahwa bentuk partisipasi yang berkembang tidak bersifat simbolik atau semu. Kelembagaan desa juga perlu diperkuat agar dapat memainkan peran sebagai fasilitator partisipasi yang adil dan inklusif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan politik partisipasi. Studi komparatif antar desa dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda juga akan sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana konteks lokal mempengaruhi bentuk dan intensitas partisipasi. Selain itu, fokus pada partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan perlu dikedepankan dalam penelitian lanjutan guna menciptakan model pembangunan desa yang lebih inklusif dan demokratis.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. <https://perencanaan.bappenas.go.id/>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Cornell University.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Hadi, A. P. (2010). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. Yayasan Agribisnis.

- Itamar, H., Alam, A. S., dan Rahmatullah, R. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 91-108. Doi : <https://doi.org/10.31947/jgov.v7i2.1248>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A. Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3): 1-15
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk Partisipasi dalam Program Desa Siaga. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Universitas Airlangga.
- Pramudya, F. R., Marsingga, H. P., & Purnamasary, H. (2022). Partisipasi Desa Warung Bambu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 6(4):2129-2133
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1).
- Nurlan, F. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV.Pilar Nusantara
- Ridwan Abbas. (2022). 26 Tahun Tak Diperhatikan Pemerintah, Warga Batualu Toraja Swadaya Perbaiki Jalan Rusak. *Tribun Toraja*. <https://makassar.tribunnews.com/2022/11/12/26-tahun-tak-diperhatikan-pemerintah-warga-batualu-toraja-swadaya-perbaiki-jalan-rusak>
- Riswanto. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Desa. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Tribhuwana Tungadewi
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta
- Sakaria, (1993). Hubungan Antara Pendidikan Formal, Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Survey Di Kelurahan Takkalala Kabupaten Luwu). *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Hasanuddin.
- Sakaria, T. A.(2022). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Uphoff, N. (2005). Grassroots Organizations and NGOs in Rural Development: Opportunities with Diminishing States and Expanding Markets. *World Development*, 33(6), 951-963. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.09.004>
- World Bank. (1996). *The World Bank Participation Sourcebook*. Washington, DC: World Bank.